Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) >> Skripsi STIK-PTIK

Pelaksanaan quick wins transparansi pelayanan SIM, STNK dan BPKB (SSB) pada sat lantas Polres kota Cimahi dalam mewujudkan kepuasan masyarakat

Erwin Aras Gendo

Deskripsi Lengkap: https://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=42607&lokasi=lokal

---

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pemahaman aparat Polres Kota Cimahi terhadap pelaksanaan Quick Wins Wins transparansi pelayanan SIM , STNK, dan BPKB (SSB) pada Sat Lantas Polres Kota Cimahi dalam mewujudkan kepuasan masyarakat. Memberikan penjelasan dan analisis tentan pelaksanaan Quick Wins Wins transparansi pelayanan SIM , STNK, dan BPKB (SSB) pada Sat Lantas Polres Kota Cimahi dalam mewujudkan kepuasan masyarakat. Mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Quick Wins Wins transparansi pelayanan SIM , STICK, dan BPKB (SSB) pada Sat Lantas Polres Kota Cimahi dalam mewujudkan kepuasan masyarakat.
Sebagai pisau analisis penulis menggunakan teori kinerja, Teori Pelayanan, Kerjasama, Konsep Quick Wins, Konsep Grand Strategi Poiri tahun 2010-2014. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Studi Kasus, dan _ Tehnik Pengumpulan data Pengamatan, Wawancara dan penelitian dokumen. Adapun sumber informasi dalam skripsi adalah Kapolres Kota Cimahi, Kasat Lantas,
Kanit Regident, Baur Regident, Anggota Lantas (pelayanan) dan tokoh masyarakat.
Teknik analisis data melalui Klasifikasi data, Red uksi data, Sajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.
Berdasarkan hasil temuan penelitian maka, Pemahaman anggota Poiri khususnya Sat Lantas Polres Kota Cimahi terhadap pelaksanaan Quick Wins Wins transparansi pelayanan SIM , STNK, dan BPKB (SSB) pada Sat Lantas Polres Kota Cirnahi dalam mewujudkan kepuasan masyarakat secara urnum dapat dikatakan cukup baik. Pemahaman tersebut diperoleh pada saat APP dari pimpinan dan
elatihan yang diselenggarakan oleh Polres Kota Cimahi. Pelaksanaan Quick. Wins Wins transparansi pelayanan SIM , SiNK, dan BPKB (SSB) pada Sat Lantas Polres Kola Cimahi daiem mewujudkan kepuasan masyarakat meliputi pelaksanaan prosedur pelayanan, Waktu Pelayanan, Transparansi biaya, Skap clan perilaku pemberi pelayanan, Kompetensi pemberi pelayanan dan sarana dan prasarana pendukung pelayanan (tekhnologi). Sedangkan faktor - faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan Quick Wins Wins transparansi pelayanan SIM , STNK, dan BPKB (SSB)
pada Sat Lantas Polres Kota Cimahi dalam mewujudkan kepuasan masyarakat meliputi faktor internal dan faktor eksternal yaitu berupa faktor pendukung dan enghambat. Faktor pendukung antara lain kemampuan dan ketrampilan personil, Fersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan motivasi kerja personil. Sedangkan faktor internal penghambat yaitu masih minimnya personil yang mengikuti pendidikan dan kejuruan. Selain itu faktor penghambat eksternal yaitu meliputi pemahaman dan ketrampilan masyarakat dalam penggunaan tekhnologi komputer.
Dalam penelitian ini di sarankan pelaksanaan Quick Wins Wins transparansi pelayanan SIM , STNK, dan BPKB (SSB) pada Sat Lantas Polres Kota. Cirnahi dalam mewujudkan kepuasan masyarakat, make Sat Lantas dapat melakukan inovasi dengan membuat terobosan baru dalam mengembangkan sistem pelayanan

terpadu
seperti pelayanan Drive Thru seperfi Samsat Jakarta--arat dan Polda Jawa-Timur.
Pelaksanaan Quick Wins pada Fungsi Lalu Lintas terbukti memiliki key leverage atau
daya ungkit kuat dan iangsung dapat dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang relatif cepat, sehingga pencitraan yang dilakukan oleh poiri dalam meraih simpatl
masyarakat dapat terwu ud, oieh karena itu program quick wins ini harus dipertahankan dan ditingkatkan serta dilakukan evaluasi setiap 3 bulan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Selain itu untuk keseragaman oenyediaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan ujian teori SIM baru yang menggunakan program AVIS serta sarana penulisan BPKB baru yang menggunakan computer untuk keseragaman pengadaan supaya dilakukan secara terpusat oleh Mabes Poiri dalam halvini oleh Direktorat Lalu Lintas Poiri dan untuk perawatan supaya dimesukkan dalam anggaran DIPA, hal ini untuk menghindari acianya pungutan liar dalam hal parawatan peralatan tersebui.